

## **DINAMIKA POLITIK PKB (Studi tentang Konflik Internal 1999-2004)**

### **Politycal Dynamics PKB Study of internal conflict 1999-2004**

Ummy Kulsum, Hendro Sumartono, Sunarlan.  
Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember  
Email: [purple\\_lovely@ymail.com](mailto:purple_lovely@ymail.com) 085258888333

#### **Abstrak**

Skripsi yang disusun menggunakan data primer dan sekunder membahas tentang Dinamika Politik PKB khususnya menyangkut konflik internal PKB 1999-2004. Cakupan pembahasan meliputi latarbelakang, proses berdirinya PKB, pengaruh pemikiran perilaku politik Gus Dur, konflik internal dan penurunan suara PKB pada pemilu 2004.

Akar permasalahan konflik internal PKB menyangkut persoalan kepentingan politik. Keinginan Poros Tengah yang menghendaki Gus Dur sebagai Presiden RI mendapat tanggapan pro dan kontra di PKB. Muara konflik dimulai pihak Poros Tengah yang menghendaki Gus Dur menjadi Presiden RI tetapi sebagian kyai sepuh menginginkan Gus Dur sebagai guru bangsa. Namun Gus Dur menerima tawaran Poros Tengah untuk menjadi Presiden. Hal ini berdampak PKB pecah menjadi dua kubu pertama PKB Kuningan Versus PKB Batu Tulis. Setelah Gus Dur menjabat sebagai Presiden ia hanya berkuasa selama 1,5 tahun, kemudian terjadi pemakzulan Gus Dur oleh Poros Tengah. Pemakzulan Gus Dur sebagai Presiden RI menyebabkan konflik internal yang ke dua yaitu PKB Muktamar Semarang Versus PKB Muktamar Surabaya.

Akibat dari Konflik yang terjadi di PKB menimbulkan kemerosotan suara pada pemilu 2004. Subtansi konflik yang berkepanjangan mengklaim anggapan tiada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi hanyalah kepentingan individu masing-masing elit partai.

**Kata kunci:** dinamika politik, PKB, Poros Tengah, pemakzulan, konflik

#### *Abstract*

This thesis was prepared using primary and secondary data discussed about Political Dynamics in internal conflict of PKB 1999-2004. The scope of discussion covered the background, the proses of establishment of PKB, the influence of behavior thought in Gus Dur's politic, the internal conflicts and a decrease of the vote for PKB in the 2004 election.

The problem source of internal conflict in PKB was the political interest. The wis of Central Axis who wants Prt Gus Dur to be the President of RI got pro's and con's responses in PKB. The conflict sources began from central axis side hoped Gus Dur become the President of RI but part of older kyai wanted Gus Dur become a teacher of nation. Unfortuntdely Gus Dur received on offer of central axis to be the President, so this condition made affects to PKB that got dissension to be two fortification that is PKB Kuningan and PKB Batu Tulis. After he is President, he hold the power only one and half year, after that there was deposing for Gus Dur from the central axis. The deposing of Gus Dur to be the President of RI caused the second internal conflict, that were PKB Muktamar Semarang and PKB Muktamar Surabaya.

The affects of PKB conflict made the vote declining in 2004 election. The long substance of conflict claimed that there was no eternal friends and enemies, but it was only the self interest for each party elite.

**Keywords:** political dynamics, PKB, Central Axis, declining, conflict

## PENDAHULUAN

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) salah satu partai yang lahir ketika kebebasan politik di Indonesia mulai bersinar. Kelahiran partai ini tidak hanya didasarkan atas reaksi alam bawah sadar para pendirinya ketika melihat adanya peluang kekuasaan yang dapat direbut. PKB didirikan atas mandat dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang selama 32 tahun mengalami keresahan dan kegelisahan yang luar biasa akibat politik marginalisasi dan hegemoni yang diterapkan oleh Orde Baru. PKB dibentuk untuk mewadahi aspirasi warga Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai sebuah entitas kultural yang besar dan mewarisi nilai-nilai luhur para pendiri bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai *humanisme*, *egalitarianisme*, dan *toleransi* demi mewujudkan keadilan, NU merasa berkewajiban untuk meningkatkan kiprah politik dalam pentas kekuasaan di Indonesia, untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang plural, yang dilandasi oleh semangat kebersamaan dalam membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Suatu langkah ditempuh bukan untuk menyeret NU ke dalam wilayah politik praktis, melainkan melalui pembentukan intuisi (badan) politik yang secara kultural mengemban mandat politik tersebut diatas. Sayap politik inilah yang termanifestasikan dalam sebuah partai politik yang bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kelahiran PKB membawa ambisi dan agenda yang jelas serta mandat politik yang tegas. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan misi agenda dan menjaga mandat politik tersebut dalam menjaga kinerja partai dalam konsentrasi pada saat pemilihan umum. Eksistensi politik PKB dengan basis dukungan utama warga Nahdliyin tersebut menurut banyak pengamat politik persentasenya cukup signifikan dan relative konstan. PKB sesungguhnya memiliki potensi untuk berkalah sebagai kekuatan politik yang strategis. Selama PKB didirikan dan pergerakan partai yang dimainkan cukup memberi warna dalam dinamika politik negeri ini, meskipun dalam beberapa hal Nampak belum maksimal. Terpilihnya Gus Dur menjadi presiden ke 4 RI melalui Sidang Umum MPR tahun 1999, telah mencatatkan

sejarah tersendiri bagi proses demokrasi di Indonesia, umat Islam Indonesia dan khususnya warga NU. Terlepas dari kepentingan taktis politik yang mungkin ada dibaliknya, terpilihnya Gus Dur sebagai Presiden dalam proses demokrasi yang untuk pertama kalinya berlangsung terbuka di parlemen pada waktu itu, dapat dikatakan sebagai respon positif dua kekuatan politik (Islam dan Nasionalis-Sekunder) terhadap posisi PKB dan tokoh sentral tersebut.

Meskipun dilahirkan oleh kalangan NU, PKB tidak didesain sebagai partai yang menempatkan agama sebagai ideologi atau lebih khusus lagi sebagai partai Islam. PKB, sebagaimana dituangkan dalam Mabda Syiasi adalah partai terbuka dalam pengertian lintas agama, suku, ras dan lintas golongan yang dimanifestasikan dalam bentuk visi, misi, program perjuangan, keanggotaan dan kepemimpinan. Keterbukaan PKB tidak hanya disimbolkan dalam kehadiran kepengurusan atau keanggotaan yang pluralistik namun yang lebih substansial adalah keterbukaan dalam sikap dan perilaku politik serta rumusan cita-cita partai tersebut. Dalam perjalanan politiknya, PKB mampu memperoleh dukungan rakyat dalam jumlah yang cukup signifikan. Pemilu 1999, dengan perolehan suara 13.336.982 (12,6%) menempati urutan 3 setelah PDIP dan Golkar. Hanya saja dalam perolehan kursi DPR RI, PKB hanya menduduki posisi keempat dengan meraih 51 kursi. Jumlah itu masih dibawah "seteru" politiknya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memperoleh 58 kursi.

Langkah politik PKB yang mengejutkan sekaligus dikemudian hari membuahkan perpecahan di internal partai adalah Konflik internal *pertama* di PKB dimulai dari adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Matori Abdul Djalil atas instruksi DPP agar tidak hadir dalam Sidang Istimewa 2001 dan sebagai sanksi Matori diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum dewan tanfidz. Keputusan pemberhentian tersebut dilakukan melalui prosedur dan berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan AD/ART sehingga mempunyai landasan hukum. Semula Matori diam saja atas pemberhentiannya dan kemudian ketika dia diangkat mejadi mentri pertahanan dalam kabinet gotong royong pimpinan Megawati ia mulai mempersoalkan pemberhentian-nya dan menyatakan keputusan

DPP (Dewan Pimpinan Pusat) bertentangan dengan AD/ART. Matori melakukan perlawanan dan melaksanakan lawatan-lawatan politik ke kantong PKB dalam setiap lawatan-nya berbasis konstituen dalam simpul dari massa PKB. Gerakan matori ini diformalisasikan dengan mendeklarasikan PKB yang mengklaim sebagai PKB yang sah setelah memecat Gus Dur dari jabatan Ketua Umum Dewan Syuro dan digantikan oleh Ibrahim Laconi. PKB versi Matori ini bermarkas di daerah Batu Tulis Jakarta, sehingga dikenal dengan PKB Batu Tulis. Sedangkan PKB Gus Dur disebut PKB Kuningan sesuai dengan alamat DPP.

Konflik *kedua* terjadi antara DPP-PKB pimpinan Gus Dur dengan kelompok pimpinan Choirul Anam. Diawali dari pemecatan terhadap Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf dari posisi Ketua Umum dan Sekjend DPP-PKB yang kemudian melebar menjadi konflik institusional. Alwi Shihab menggugat secara perdata. Pada saat proses hukum sedang berjalan, DPP-PKB menyelenggarakan Muktamar II PKB di Semarang. Pada saat itu terdapat beberapa tokoh partai yang menyatakan *mufarogh* (memisahkan diri dari PKB) dan mendirikan PKB tandingan. Kemenangan Gus Dur dan Muhaimin Iskandar secara demokratis dalam pemilihan dewan syuro dan ketua umum dewan Tanfidz ternyata tidak dapat diterima oleh para pesaingnya yang kemudian menggugat hasil Muktamar tersebut. Dimanfaatkanlah kasus pemecatan Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf sebagai alasan pembenar atas gerakan mereka. Kelompok penolak hasil Muktamar yang dipimpin oleh Choirul Anam didukung dari kelompok eksternal yang memegang kekuasaan. Dibuktikan dengan keluarnya SK Menkumham nomor M-11.UM.06.08 Tahun 2005, berisi penerimaan pendaftaran DPP-PKB pimpinan Choirul Anam sebagai hasil dari apa yang disebut “Muktamar Surabaya”.

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Dengan proses menguji dan menganalisis secara kritis atas peristiwa di masa lampau. Metode ini terdiri dari empat langkah, yaitu: Pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (kritik intern dan ekstern), penafsiran

sumber (interpretasi), serta penulisan sejarah (historiografi).

Penelitian tentang “Dinamika politik Partai Kebangkitan Bangsa” penulis menggunakan pendekatan Sosiologi Politik. Sosiologi adalah ilmu tentang sistem hubungan yang berlaku dan proses yang timbul dalam masyarakat. Hubungan antara NU dan PKB, PKB dengan masyarakat umum ataupun Abdurrahman Wahid dengan PKB dipaparkan secara sosiologis dalam penulisan ini. Politik adalah sebuah faham yang menyangkut tentang kekuasaan (politik praktis), mempelajari kehidupan masyarakat dengan berbagai situasi politiknya. Peran PBNU dan PKB dalam politik praktis termasuk elit-elit politik didalamnya dikaji secara politik. Politik memang tidak mengenal kawan atau lawan yang abadi. Yang abadi adalah kepentingan politik individu atau kelompok. Sekokoh apa pun landasan yang dibangun, bila hanya didasari kepentingan strategis tanpa didukung oleh ideologi, akan hancur saat kepentingan politik yang mereka perjuangkan mulai tampak berbeda.

Penelitian ini juga menggunakan teori konflik untuk mendukung penulisan ini. Dalam setiap pengelompokan manusia akan melahirkan kekuatan dan mengandung benih-benih konflik. Mereka yang mempunyai pandangan sama akan berkumpul dan membentuk komunitas baru dan semakin lama akan terjadi kesenjangan sosial diantara mereka kemudian menimbulkan konflik. Menurut teori konflik George Ritzer dan Douglas J. Goodman, dalam teori konflik tersebut mengatakan bahwa apapun keteraturan dalam masyarakat berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya oleh mereka yang berada diatas, jelas sudah bahwa kemunculan seorang aktor utama sangat mempengaruhi perkembangan konflik yang terjadi, tentunya selain dari faktor eksternal.

Metode wawancara juga digunakan sebagai acuan penelitian. Selain itu bisa menggunakan arsip dan dokumen lain dengan obyek yang diteliti. Sumber sekunder, yakni kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi langsung dari seseorang yang tidak hadir dari peristiwa yang dikisahkan. Dalam skripsi ini sumber sekunder meliputi penggunaan buku yang membahas tentang dinamika politik PKB.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga menggunakan metode deskriptif analitis.

Deskriptif analitis merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi tepat melukiskan secara akurat sifat-sifat dari beberapa fenomena, kelompok atau individu yang menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk meminimalkan dan memaksimalkan realibilitasnya, analisis dikerjakan berdasarkan data, yang artinya dapat dikumpulkan setelah selesai berlangsung. Berdasarkan pendapat diatas, penelitian deskriptif analitis lebih bersifat untuk mencari sebab dan akibat terjadinya suatu permasalahan dengan mempersoalkan apa, siapa, kapan, dimana dan bagaimana atau lebih sering disebut 5 W+1 H.

## PEMBAHASAN

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah salah satunya. Gus Dur yang pada saat itu Ketua Tanfidziyah PBNU tak bisa menolak ketika banyak kalangan Nahdliyin meminta agar NU membentuk partai politik. Meski tidak langsung menyetujuinya, Gus Dur mengakui bahwa permintaan tersebut sebagai salah satu cara melawan dominasi Golkar dalam pemilihan umum. Kuatnya arus dukungan kaum Nahdliyin untuk mendirikan partai politik, akhirnya mendorong Gus Dur dan sejumlah kyai NU, melalui persiapan yang panjang akhirnya menyelenggarakan rapat harian Syuriah dan Tanfidziyah pada tanggal 22 juli 1998. Dari hasil rapat itulah partai politik yang diharapkan dapat menampung aspirasi warga NU yang dideklarasikan pada tanggal 23 juli 1998 di pondok pesantren milik Gus Dur di kawasan Ciganjur Jakarta Selatan. Dengan difasilitasi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), partai politik warga NU ini dideklarasikan oleh lima orang kyai "*sepuh*" NU yang bertindak sebagai deklalator, yaitu KH Ilyas Ruchiyat, KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), KH. Muchid Muzadi, KH. Munasir Ali dan tentunya Gus Dur. Tetapi Pembentukan PKB banyak mengundang kritik dan pertanyaan apalagi menyangkut Khittah 1926. Pembentukannya PKB yang dianggap melanggar Khittah 1926 maka dalam kapasitas nya sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU, Gus Dur mengeluarkan intruksi agar para fungsionaris NU di segala jenjang kepengurusan tidak boleh merangkap jabatan di dalam kepengurusan PKB. Sikap dan keputusan PBNU untuk menokaktifkan

fungsionaris dalam kampanye dan pencalonan legeslatif , dapat dipahami sebagai upaya menjalankan pedoman berpolitik NU, serta membuktikan netralitas NU dalam kegiatan politik praktis.

Kiprah PKB dalam dinamika perpolitikan di Indonesia, sesungguhnya masih sangat dinantikan oleh masyarakat. Terlebih, di tengah kondisi kehidupan kebangsaan Indonesia sekarang ini, yang banyak mengalami permasalahan serius; semakin tercerabutnya akar budaya bangsa, terpinggirkannya nilai-nilai moral keagamaan dan terabaikannya hak-hak dasar rakyat. Eksistensi politik PKB dengan basis dukungan utama warga Nahdliyin tersebut menurut banyak pengamat politik persentasenya cukup signifikan dan relative konstan. PKB sesungguhnya memiliki potensi untuk berkiprah sebagai kekuatan politik yang strategis. Tetapi dalam perjalanan politiknya ( PKB )terjadi beberapa konflik yang terjadi diantaranya konflik dengan Matori Abdul Djalil. Konflik internal PKB dimulai dengan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Matori atas intruksi DPP agar tidak hadir pada sidang Istimewa MPR tahun 2001. Sebagai sanksi, Matori Abdul Djalil diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz. Keputusan pemberhentian tersebut dilakukan melalui prosedur dan berdasarkan atas pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan AD/ART sehingga landasan hukum sangatlah kuat.

Semula Matori Abdul Djalil diam saja atas pemberhentiannya, tetapi begitu dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati Soekarno Putri, dia mulai mempersolkan pemberhentiannya dan mengatakan keputusan DPP bertentangan dengan AD/ART atau tidak sah. Matori mulai melakukan perlawanan dengan melaksanakan lawatan-awatan politik ke PKB. Dalam setiap lawatannya berbasis konstituen serta simpul masa PKB, Matori mengatakan DPP telah berbuat sewenang-wenang.

Gerakan politik Matori ini selanjutnya diformalisasi dengan mendeklarasikan PKB yang di klaimnya sebagai PKB yang sah dimata hukum setelah terlebih dahulu memecat Gus Dur dari jabatan Ketua Umum Dewan Syura. Dan menggantinya dengan Ibrahim Laconi. PKB versi Matori ini bertempat di batu tulis

sehingga dikenal sebagai PKB Batu Tulis. Sedangkan PKB Gus Dur disebut PKB kuning sesuai dengan alamat DPP.

Pertikaian politik di dalam internal PKB terus semakin membesar, terlebih keduanya saling mengklaim hak hukum setelah sama-sama mengadakan Muktamar Luar Biasa (MLB) yang mana pihak Gus Dur menyelenggarakan MLB di Yogyakarta sedangkan Matori menyelenggarakannya di Jakarta. Muktamar sama-sama diadakan pada bulan Januari 2002. Pada waktu itu MLB di Yogyakarta mempersiapkan tiga langkah untuk menghadapi kubu Matori. Dalam sebuah pertemuan antara DPP PKB dengan kyai-kyai sepuh di Pondok Pesantren Futuhiyah Mranggen Demak Jawa Tengah awal April 2002, disepakati untuk menyelesaikan masalah ini ke jalur hukum di pengadilan sesuai dengan yang telah di lontarkan Matori. Namun untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk disepakati juga untuk melaksanakan amanat MLB, yaitu menyiapkan partai politik baru yang dalam pertemuan itu diputuskan nama Partai Kebangkitan Nasional (PKN). DPP PKB masih mencoba menempuh jalan lain untuk menghindari perselisihan di pengadilan yaitu menawarkan *arbitasi* kepada Matori. *Arbitasi* tersebut dilakukan guna menunjuk beberapa orang yang dianggap ahli dan arif untuk membuat keputusan yang kemudian dipatuhi secara seksama oleh kedua belah pihak. Tetapi kubu Matori tetap bersikukuh untuk menyelesaikan persoalan melalui jalur pengadilan. Maka PKB Gus Dur melayani gugatan Matori di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut dapat dipatahkan dengan argumen hukum yang mudah karena materi gugatan pihak Matori lemah secara hukum.

Meskipun pada akhirnya, konflik itu selesai namun bibit-bibit konflik yang lebih panjang sesungguhnya baru akan dimulai. Hal yang membuat citra partai semakin memburuk lagi setelah munculnya konflik baru yang berujung pada perpecahan pasca Muktamar II PKB di Semarang pada tahun 2004. Muktamar sebagai salah satu media konsolidasi justru membuahkan konflik baru. Imbas dari konflik di Muktamar II Semarang membuat PKB terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu Gus Dur-Muhaimin Iskandar berhadapan dengan Alwi Shihab - Saefullah Yusuf. Konflik ini lebih panjang. Selain

konflik melalui proses peradilan, perseteruan dalam proses politik juga terus dilakukan dua kelompok itu.

Kemudian dengan Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf. Konflik diawali oleh pemecatan terhadap Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf dari Ketua Umum dan Sekjend DPP PKB. Namun selanjutnya keputusan tersebut melebar dan menjadi konflik institusional. Alwi Shihab juga membawa kasus tersebut ke pengadilan melalui suatu gugatan perdata hal ini sama seperti yang dilakukan Mathori.

Pada proses hukum sedang berjalan DPP PKB mengadakan muktamar II PKB di Semarang. Muktamar ini diikuti oleh seluruh jajaran pengurus PKB dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten/kota, termasuk aktifis-aktifis PKB. Pada saat itu terdapat beberapa tokoh partai yang menyatakan *mufarogh* (memisahkan diri dari PKB) dan mendirikan PKB tandingan. Kemenagan Gus Dur dan Muhaimin Iskandar secara demokratis dalam pemilihan ketua Umum Dewan Syuro dan ketua Umum Dewan Tanfidz pada muktamar tersebut ternyata tidak dapat diterima oleh para pesaingnya. Mereka selanjutnya mempersatukan diri untuk menggugat isi hasil Muktamar, untuk memperkuat posisi dan memanfaatkan pemecatan Alwi Shihab dan Syaifullah Yusuf sebagai suatu alasan pembenaran atas gerakan tersebut. Konflik semakin meruncing pada saat keluarnya keputusan kasasi dari Mahkamah Agung RI no. 1897/K/PDT/2005 tertanggal 15 November 2005 dalam perkara kasasi perdata antara Alwi Shihab melawan Gus Dur. Putusan Mahkamah Agung ini membatalkan surat keputusan DPP PKB no. 01762/DPP-02/III/A.I/X/2004 tertanggal 27 Oktober 2004 tentang pemberhentian dengan hormat Alwi Shihab dari jabatan Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB 2002-2005, dan menyatakan bahwa proses pemecatan Alwi Shihab tidak sah secara hukum.

Namun keputusan Mahkamah Agung tersebut hanya bersifat deklaratoir, sehingga permohonan Alwi Shihab agar dipulihkan harkat, martabat, serta kedudukan seperti semula ditolak oleh Mahkamah Agung, karena pembatalan SK DPP PKB tentang pemberhentian Alwi Shihab tersebut tidak memiliki kekuatan *eksekutorial*, karena putusannya yang bersifat deklaratoir saja. Makna dari putusan deklaratori yaitu bahwa

nama Alwi Shihab telah di rehabilitasi, namun yang bersangkutan tidak diberikan hak untuk kembali di kedudukan semula yaitu Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PLB 2002-2005. Hal ini dikarenakan karena telah diadakan Muktamar II PKB di Semarang yang sesuai dengan ketentuan AD/ART PKB dan UU no. 31/2002 tentang partai Politik.

Berpegangan atas kasasi Mahkamah Agung RI no. 1896 K/PDT/ 2005 serta keyakinan atas sahnya hasil muktamar II Semarang maka DPP PKB yang dipimpin Gus Dur dan Muhaimin Iskandar mengajukan gugatan terhadap Choirul Anam atas tuduhan penggunaan atribut partai secara melawan hukum. Gugatan tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan nomor 1445/Pdt.G/2005/PN Jaksel. Merasa tidak terima atas putusan PN Jaksel Choirul Anam mengajukan kasasi. Namun demikian dengan menggunakan pertimbangan obyektif serta didasari oleh pertimbangan kebenaran serta keadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan putusan no 02K/PARPOL/2006 yang isinya menolak seluruh permohonan kasasi Choirul Anam.

Menyingkapi keputusan dari Mahkamah Agung pemerintah tidak mau mengulangi kesalahan yang terdahulu. Oleh sebab itu menkumham segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti putusan mahkamah agung dengan mencabut surat keputusan pendaftaran DPP PKB versi Choirul Anam. Hal ini dituangkan dalam surat keputusan menkumham no M.14-UM.06.08 tahun 2006. Dengan adanya pencabutan ini maka dualisme DPP PKB telah berakhir, dan kepengurusan DPP PKB hanya satu saja yaitu hasil Muktamar II Semarang yang dipimpin oleh KH Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Tanfidz.

Sejalan dengan terjadinya konflik banyak mempengaruhi suara PKB pada pemilu 2004 terjadi penurunan suara pada pemilu tersebut. Perolehan suara PKB pada pemilu 1999 dan 2004 yang paling berpengaruh hanya ada di dua propinsi saja, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di Jawa Tengah pusran pengaruh suara ada di empat pondok pesantren diantaranya : pondok pesantren tegalrejo Magelang, pondok pesantren Rembang, Pondok pesantren Kaliwungu Kabupaten

Kendal, Pondok pesantren Benda Kabupaten Brebes. Diluar empat pondok pesantren itu masih banyak pondok pesantren atau kiai lain yang memiliki pengaruh cukup kuat meskipun tidak sekuat keempat pondok pesantren besar tersebut, diantaranya adalah KH Muhaimainan Gunardo dari Parakan, KH Muslim Rivai Imampuro dari Klaten, Kiai Mahfud Ridwan dari Pondok pesantren Edi Mancoro Salatiga dan beberapa kiai di daerah Cilacap, Banyumas dan sekitarnya. Kiai-kiai itu memiliki otoritas secara mandiri termasuk dalam sikap politiknya.

Di Jawa Timur pusran suara ada di Pondok pesantren Tebuireng di Jombang, Pondok pesantren Sukorejo Banyuputih Asembagus, Pondok pesantren Langitan Tuban, Pondok pesantren Lirboyo Kediri, Pondok pesantren Ploso, Pondok pesantren Denanyar, pondok pesantren Bangkalan Madura. Selain tujuh pondok pesantren yang sangatlah berpengaruh ada pula beberapa pondok pesantren yang juga berpengaruh atas suara PKB khususnya di daerah Jember, Bondowoso, Banyuwangi. Karena seperti yang telah diketahui banyak pondok pesantren yang menjadi pendukung basis suara PKB.

## KESIMPULAN

Akar konflik internal di tubuh PKB disebabkan oleh benturan kepentingan pragmatis dari masing-masing kader partai yang tengah memegang kekuasaan. Pola konflik yang terbangun di PKB bersifat struktural dan kultural. Konflik yang membelah struktur partai mengakibatkan dualisme kepengurusan dan pertikaian sesama kader. Dalam tataran kultural, konflik telah membuat polarisasi di kalangan kiai dan santri. Konflik internal PKB memperkuat pandangan bahwa proses institusionalisasi dalam partai tidak berjalan sebagaimana mestinya. Institusi berubah menjadi sangat personal. Imbasnya struktur partai tidak berfungsi secara optimal. Dengan bukti penurunan suara yang sangatlah drastis pada pemilu 2004.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku dan Jurnal, Surat Kabar, Laporan

AS. Muhammad Hikam. 1994. *“khittah dan penguatan Civil Society di*

- Indonesia : sebuah kajian Historis Struktural atas Nu sejak 1984''*, dalam *''Gus Dur dan Masyarakat Sipil''* LKiS, Yogyakarta.
- Masykur Ali Musa. 2010. *Pemikiran dan Sikap Politik Gus Dur*. Jakarta : Erlangga.
- Ar Ichwan.2007. *Mencari Sistem Pemilu Berbasis Suara Rakyat*. Laporan DPW PKB Jawa Tengah dalam Workshop Sistem Pemilu. Jakarta.
- Bisri Mustofa. 2008. *Gus Dur Garis Miring PKB (Kumpulan Khusus tentang Gus Dur dan PKB)*. Mata Air Publishing.
- Bottomore, Tom. 1992. *Sosiologi Politik*. (terj). Sahat Simamora. Jakarta : Rineka Cipta.
- C. Macridis Roy.1996. *''Teori-Teori Mutakhir Partai Politik''* . Yogya : PT. Tiara Wacana.
- Fajrul M Falakh. 2001. *''Nahdlatul Ulama dalam Era 1990-an''* , dalam *''Membangun Budaya Kerakyatan''*. Yogyakarta.LKiS.
- Gottchalk, Louis. 1975. *Mengerti sejarah*. (terj). Nugroho Notosusanto. Jakarta : YPUI.
- Laporan kinerja FKB – DPR RI. 2005-2006. *Khidmat Kami Bagimu Negeri*. Jakarta.
- Mabda Syiasi Partai Kebangkitan Bangsa.2004. Jakarta; DPP PKB.
- 2. Internet**  
[http://www.nu.or.id/page/id/dinamic\\_detil/12/13816/Buku/Gur\\_Dur\\_dan\\_Konflik\\_PKB.html](http://www.nu.or.id/page/id/dinamic_detil/12/13816/Buku/Gur_Dur_dan_Konflik_PKB.html) . Unduh 16 September 2012  
[http://id.wikipedia.org/wiki/Partai\\_politik\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia) ,diunduh 2 juli 2012  
[http://id.Wikipedia.org/wiki/partai kebangkitan Bangsa](http://id.Wikipedia.org/wiki/partai_kebangkitan_Bangsa). Unduh 16 September 2012  
[http:// tempo.co](http://tempo.co), *Pendeklerasian Partai Baru oleh Yenny Wahit*. diunduh 20 september 2012  
<http://www.anneahira.com/sejarah-politik.htm>. diunduh 10 Juli 2012  
<http://www.intelijen.co.id/komunitas/1344-pkb-antara-potensi-strategis-dan-munculnya-konflik>, diunduh 28 november 2012.
- 3 .Wawancara**  
Afton Imam Huda Wakil Sekertaris Dewan Tanfidz PKB Jember periode I Dan Wakil Sekertaris Dewan Syuro periode II.  
Kyai Syaiful Bari MS Ketua Dewan Syuro periode I Jember.